

Heru Budi Minta Penegak Hukum Tangkap Pelaku Penjarahan di Rusunawa Marunda

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta aparat penegak hukum menangkap para pelaku penjarahan aset di kluster C Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Ia telah berkoordinasi dengan kepolisian sektor setempat mengenai hal ini.

"Harus ditindak karena itu sudah melanggar hukum," ujar Heru di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).

Heru menyebut ada beberapa kasus penjarahan yang sudah diproses secara hukum, meski ia tidak memberikan detail lebih lanjut.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini memastikan bahwa tidak ada rencana untuk membongkar rusun yang tidak berpenghuni tersebut. Ia hanya fokus pada penanganan pelaku penjarahan.

Heru mengklaim pelaku penjarahan itu ada yang sudah ditangkap polisi.

Walau demikian, Heru tak mengungkap siapa saja para penjarahnya sekaligus jumlah yang sudah ditangkap.

"Ya pelakunya kami tangkap saja," kata Heru.

Heru menyatakan para pelaku penjarahan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Heru menjamin Pemprov Jakarta sudah berkomunikasi dengan kepolisian terkait masalah penjarahan itu.

"Sekarang sudah koordinasi dengan Polres, Polsek setempat, ya harus ditindak itu kan sudah melanggar hukum. Ada beberapa yang sudah mau diproses," ujar Heru.

Selain itu, Heru menyampaikan tidak akan melakukan pembongkaran rusun setelah munculnya aksi penjarahan tersebut.

"Enggak ada," ujar Heru.

Diketahui, Pemprov Jakarta merelokasi warga Rusun Marunda ke Rusun Nagrak pada tahun lalu. Relokasi tersebut bertujuan merevitalisasi Rusun Marunda lantaran hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi

Nasional (BRIN) bangunan kluster C rusun itu tidak layak secara struktur bangunan.

Setelah berjalan relokasi, aset di rusun itu malah dikabarkan dijarah. Barang yang dijarah dikabarkan seperti besi atau tralis balkon, kabel, alumunium, kusen, closet, wastafel, pintu, dan jendela.

Belum Terima Laporan Kanit Reskrim Polsek Cilincing, Ipda Philip Ginting, mengaku belum menerima laporan terkait penjarahan aset di 500 unit kluster C Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, yang terjadi sejak 2023.

"Jadi, setelah saya tanya penyidik saya, itu dari pihak rusun tidak membuat laporan polisi. Jadi, kami tidak bisa proses karena tidak ada laporan polisi," kata Ginting, Rabu (19/6).

Ginting menjelaskan, pada 11 Desember 2023, Polsek Cilincing sempat mengamankan mobil pick up pengangkut besi dari Rusunawa Marunda.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sang sopir, ia mengaku hanya disewa. "Mobil yang diamankan itu itu hanya mangkal di sekitar rusun. Kemudian, disewa, ayo (disuruh) angkat besi itu," ucap Ginting.

Usai pemeriksaan, polisi menunggu laporan dari pengelola Rusunawa Marunda. Namun, setelah 1 x 24 jam, laporan itu juga tidak dilakukan oleh para petugas Rusunawa Marunda. "Ketika diamankan belum ada laporan, jadi kami hanya bisa mengamankan 1x24 jam dan dia (sopir pick up) bukan pelaku dan turut serta (dalam aksi penjarahan)," jelas Ginting.

Sebagai informasi, kluster C Rusunawa Marunda terbelengkalai dan seluruh asetnya raib dijarah maling sejak Oktober 2023 lalu. Mulai dari besi atau tralis balkon, kabel, alumunium, kusen, closet, wastafel, pintu, dan juga jendela di setiap unit sudah abis diambil maling. ● yan

Ditanya Minat Maju Pilkada Jakarta, Heru Budi: Prasetyo Lebih Pantas

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kembali tidak menjawab gamblang apakah dirinya berminat untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Dia malah menyebut nama kader PDIP yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan kegiatan ziarah di TMP Kalibata Jakarta Selatan, Rabu (19/6). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk rangkaian perayaan HUT ke-497 Jakarta. "Oh ini, yang paling pantas adalah Pak Ketua DPRD (Prasetyo Edi Marsudi) jadi Cawagub DKI," ujar Heru.

Diketahui, sejumlah nama digadang-gadang maju sebagai Calon Gubernur Jakarta Jakarta 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta bahkan telah mengusulkan nama Anies Rasyid Baswedan sebagai calon gubernur (cagub). Anies pun sudah diusulkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta.

Nama Anies juga mun-

cul di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi dari DPP PKB, DPP PKS, dan DPP PDIP.

Beredar pula nama Ridwan Kamil yang sudah mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga sudah mendapat surat tugas dari DPP Partai Golkar untuk maju di dua daerah yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat. Namun, belum jelas apakah Ridwan Kamil jadi maju di Jakarta atau memilih melanjutkan tugas di Jawa Barat.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, juga berpeluang maju sebagai calon wakil gubernur (cawagub). Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi dari DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024. Sementara, pencoblosan dilakukan pada 27 November 2024. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



PROGRES PEMBANGUNAN LRT JAKARTA RUTE

Velodrome-Manggarai Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalur kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta fase 1B rute Velodrome-Manggarai di kawasan Manggarai, Jakarta, Rabu (19/6). Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B dengan rute sepanjang 6,4 km yang menghubungkan lima stasiun (Pemuda Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai) telah mencapai tahap pemasangan girder penopang jalur perlintasan atas.

Pemprov DKI Siap Hadapi Penurunan Kualitas Udara

Walaupun di tengah-tengah kondisi udara yang sedang menurun, Pemprov DKI sudah memiliki langkah yang jelas dalam menanggulangi pencemaran udara. Kita sedang dalam proses menyelesaikan itu, ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan

Hidup (DLH) terus melanjutkan upaya serius dalam menanggulangi penurunan

kualitas udara di Jakarta.

Upaya yang dilakukan yakni melalui implementasi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan bahwa dengan mengikuti langkah yang ditetapkan SPPU, Jakarta akan lebih tepat sasaran dalam memperbaiki kualitas udara karena semua penyebab dan solusinya sudah dikaji dan

terukur.

"Walaupun di tengah-tengah kondisi udara yang sedang menurun, Pemprov DKI sudah memiliki langkah yang jelas dalam menanggulangi pencemaran udara. Kita sedang dalam proses menyelesaikan itu," ungkap Asep dalam keterangan tertulis, Rabu (19/6).

Menurutnya, langkah-langkah yang sedang dilakukan DLH adalah mengembangkan sistem inventarisasi emisi yang lebih sistematis untuk memantau sumber-sumber polusi udara di Jakarta.

Sistem ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih baik tentang emisi dari berbagai sumber, termasuk kendaraan bermotor dan industri.

Selain memperketat pengawasan terhadap sumber emisi bergerak dan tidak bergerak, juga langkah strategis lainnya, yaitu kerja sama lintas daerah, terutama daerah alomerasi Jakarta.

"Untuk itu, kami mendorong pemerintah daerah di sekitar Jakarta untuk lebih ketat dalam mengawasi industri di wilayahnya yang berpotensi mencemari udara di sana dan terbawa angin ke Jakarta," tegas Asep.

Terkait penurunan kualitas udara yang terjadi akhir-akhir ini, Asep menjelaskan bahwa menurut hasil analisis model HYSPLIT dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) yang dilakukan oleh Tim Ahli IPP menunjukkan bahwa dalam dua hari terakhir, angin dominan berasal dari arah Timur dan Timur Laut.

HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) adalah model yang digunakan untuk mensimulasikan pergerakan dan penyebaran polutan di atmosfer, membantu dalam memahami sumber dan dampak polusi udara. Asep menambahkan, bahwa perubahan perilaku masyarakat dengan beralih menggunakan transportasi publik, bersepeda, dan berjalan kaki untuk mobilisasi jarak dekat juga upaya yang dapat memperbaiki kualitas udara Jakarta.

"Itu juga kami kampanyekan. Selain itu, upaya jangka pendek juga kita tempuh dengan mengimbau pengelola gedung-gedung tinggi memasang water mist dan memperketat uji emisi kepada pemilik kendaraan bermotor di Jakarta," pungkas Asep. ● yan

KRITIK ATURAN BARU BEBAS PAJAK DI JAKARTA

Anies: Jangan Sampai Pelan-pelan Warga Tergeser

JAKARTA (IM) - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritik kebijakan baru pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang kini hanya berlaku bagi satu hunian yang nilainya di bawah Rp 2 miliar

Menurut Anies, aturan baru tersebut bisa membuat warga Jakarta perlahan-lahan tergeser berpindah ke luar kota. "Jangan sampai kebijakan pajak atau kebijakan tata ruang ini membuat sebagian dari kita pelan-pelan tergeser dari dalam kota dan akhirnya harus pindah ke luar kota karena kebijakan tersebut," kata dia kepada wartawan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, kebijakan terkait ini mestinya disosialisasikan dengan baik ke seluruh warga. Jangan sampai ada warga yang tak tahu bahwa mulai tahun 2024 ini, hunian kedua, ketiga, dan seterusnya tidak lagi bebas dari pajak.

"Semua kebijakan yang dibuat itu harus disosialisasikan dengan baik, supaya masyarakat tidak terkejut dan kita hormati warga dengan

cara memberitahu bila ada perubahan," tutur dia.

Lebih lanjut, Anies menyebut, kebijakan yang dibuat Pemprov DKI tak boleh membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Terlebih, Jakarta adalah kota untuk semua kalangan.

Menurutnya, prinsip itu harus dipegang teguh oleh pemerintah terkait. "Kita ingin agar Jakarta menjadi kota yang bisa terasa seperti rumah bagi semua. Kebijakan pajak, kebijakan tata ruang, sesungguhnya adalah tentang siapa tinggal di mana, siapa boleh tinggal di mana. Kita ingin semua orang boleh tinggal di Jakarta," ungkap Anies. "Prinsip itu yang dulu kami pegang terus, kami ingin warga Jakarta termasuk yang prasejahtera bisa tinggal di Jakarta dengan tenang," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, serta Kemudahan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2024. Berdasarkan aturan terbaru, per tahun 2024 ini warga Jakarta yang memiliki lebih dari satu hunian yang Nilai Jual Objek

Pajak (NJO) di bawah atau sama dengan Rp 2 miliar, bakal dikenai PBB.

"Semuanya terkena (bayar PBB) setelah ada (jika punya) rumah kedua, ketiga dan seterusnya," kata Heru Budi saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).

Sementara, bagi warga Jakarta yang memiliki satu rumah yang nilainya di bawah Rp 2 miliar masih terbebas dari pembayaran pajak hunian. "Untuk masyarakat yang bawah itu kan tidak terkena apa-apa, Rp 2 miliar ke bawah gratis, pensiunan kalau dia punya rumah, tanah satu, gratis," paparnya.

Pergub tersebut menggantikan aturan bebas pajak bagi semua rumah di Jakarta yang nilainya di bawah Rp 2 miliar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. Menurut aturan sebelumnya yang berlaku sejak tahun 2022, semua warga DKI Jakarta yang memiliki hunian dengan nilai jual objek pajak (NJO) di bawah Rp 2 miliar tidak dikenai pajak. ● yan

Gerindra Bantah Tawari PKS Isi Kursi Cawagub DKI

JAKARTA (IM) - Dinamika Pilgub DKI masih terus mengalir. Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Habiburokman menepis Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyodorkan tawaran posisi calon wakil gubernur (cawagub) kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi kalau teman-teman PKS ingin informasikan adanya tawaran menjadi cawagubnya Pak Ridwan Kamil mungkin itu dari orang perorang petinggi partai politik anggota Koalisi Indonesia maju. Jadi belum menjadi tawaran yang resmi," kata Habiburokman dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Rabu (19/6).

Sebab, kata dia, KIM hingga saat ini belum membuat keputusan resmi terkait figur pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Meski demikian, dia menghargai dinamika proses politik yang berjalan menghadapi Pilkada 2024. Dia pun berharap tidak ada lagi kubu-kubu partai politik seperti saat pemilihan presiden.

"Berharap tidak ada lagi kubu-kubuan di Pilkada kali ini, di DKI khususnya, partai-partai yang kemarin mungkin berbeda koalisi dengan kami bisa jadi saat ini bersatu dengan kami," tuturnya.

Untuk itu, dia menyebut bahwa partainya akan terus berupaya melakukan penjajakan politik dengan partai-partai politik lain guna

menentukan figur yang akan diusung pada Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi demi kebaikan, demi masyarakat Jakarta, kami terus mencoba melakukan penyamaan frekuensi dengan seluruh partai politik yang ada. Hasilnya jika nanti sudah disepakati tentu kami akan update kepada rekan-rekan siapa cagub siapa cawagub yang akan diajukan oleh Partai Gerindra dan juga rekan-rekan Koalisi Indonesia Maju," kata dia.

Sebelumnya, Presiden PKS, Ahmad Syaikh mengonfirmasi partainya telah menerima tawaran mengisi posisi cawagub dalam Pilkada Jakarta. "Ada (tawaran, red), makanya itu sedang kami coba analisis, kami kaji, yang mana kira-kira nanti yang paling maslahat," katanya di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (18/6). ● yan


PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA ALPHA FOCUS EQUITY FUND

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA ALPHA FOCUS EQUITY FUND dengan ini bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA ALPHA FOCUS EQUITY FUND sehubungan dengan perubahan batas minimum pembelian Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SYAILENDRA ALPHA FOCUS EQUITY FUND Kelas B dan REKSA DANA SYAILENDRA ALPHA FOCUS EQUITY FUND Kelas C sebagai berikut:

- REKSA DANA SYAILENDRA ALPHA FOCUS EQUITY FUND Kelas B dari semula "minimum sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)" menjadi "minimum sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)"; dan
- REKSA DANA SYAILENDRA ALPHA FOCUS EQUITY FUND Kelas C dari semula "minimum sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)" menjadi "minimum sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)".

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA ALPHA FOCUS EQUITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA  

Jakarta, 20 Juni 2024
Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



PENANAMAN BIBIT PADI BANTUAN SUDIN KPKP JAKARTA UTARA

Buruh tani menanam bibit padi varietas Inpari 32 di areal persawahan Rorotan, Jakarta Utara, Rabu (19/6). Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara membagikan sedikitnya 3,5 ton bibit padi varietas Inpari 32 kepada delapan kelompok tani (poktan) di wilayah Rorotan dan satu poktan di Marunda.

PENGUMUMAN

Direksi PT. NEWBOY INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan saham milik Vested Power Limited, sebanyak 199.000 saham dan milik Manar Altarabchi, sebanyak 1.000 saham, sehingga susunan menjadi sebagai berikut:

- Trendmasters Pte., Ltd., sebanyak 199.000 saham;
- Manmeet Singh, sebanyak 1.000 saham;

Dimana rencana pengambilalihan saham tersebut akan mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan dan tidak mengakibatkan perubahan status hak dan kewajiban karyawan Perseroan ("Rencana Pengambilalihan").

Dalam hal terdapat keberatan dari kreditur Perseroan terhadap Rencana Pengambilalihan, keberatan tersebut agar disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Perseroan dengan alamat sebagaimana tertera di bawah ini dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (2) dan (4) Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 20 Juni 2024
PT. NEWBOY INDONESIA
Gandaria 8 Office Tower Lt.25
Jl. Sultan Iskandar Muda,
Kel. Kebayoran Lama Utara,
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240